

**PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar)**

**Oleh :
Wahyu Maheldi
Pembimbing : Rita Anugerah dan Al Azhar L**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : wahyu.maheldi@gmail.com

*Influence Of Financial Administration Official Competence, The System Of
Internal Control And The Control Of Regional Finance To Value Of Local
Government Financial Reporting Information
(Study On The Unit Of Work Local Device Kampar)*

ABSTRACT

Assesed on the result of the local government of the financial reports fiscal year 2011 to 2013 received opinions qualified opinion. The result of the examination caused by government financial statement did not complete the value of characteristics information from the financial statement it self. data collection technique used was to use questionnaer. Data analyst methods used i this research is descriptive statistics data quality testing, and testing the assumption of classical. To test this hypothesis, the user used primary data. financial administration official competence influence .026, the system of internal control influence .032 and the control of regional finance influence 0.21 After the data was analyzed, it found that all of the factor have a significantly give positive influence to the value of local government financial reporting information. It means, if finance better than before, the information and financial report which produced by the government will be official competence, the system of internal control, and the control of regional finance to make financial reporting so it has information value.

Keywords: Information Value, Competence, Internal Control, And Regional Finance.

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas

atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Tuntutan tersebut menjadi suatu kewajiban, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata

disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001). Fenomena yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar tahun 2013 ternyata belum ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2013. Bukti nyata hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2013. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Kampar pada tahun – tahun sebelumnya.

Opini WDP yang diberikan oleh BPK disebabkan oleh beberapa hal berikut, (1) Persediaan. Pada saldo Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 terdapat 43 SKPD yang tidak melakukan pencatatan mutasi barang dan *stock opname*. Belum adanya koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyimpan barang mengenai penyerahan dokumen pendukung atas Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat/ Pihak ketiga. Penyajian nilai persediaan pada Dinas Kesehatan belum mencakup persediaan di Puskesmas dan barang habis pakai. Penyajian nilai persediaan pada RSUD Bangkinang tidak didukung dengan data yang valid, (2) Investasi Jangka Panjang. Investasi jangka panjang per 31 Desember 2013 diantaranya merupakan penyertaan modal pada PDAM tirta Kampar, PD Kampar

Aneka Karya, Sebelas BMT dan sebelas koperasi. Penyertaan modal pada PDAM tirta Kampar dan PD. Aneka Kampar Aneka Karya tidak didukung dengan rincian dokumen yang lengkap dan memadai. Penyertaan modal pada delapan BMT dan delapan Koperasi tidak dapat ditelusuri keberadaan dan kelangsungan BMT dan Koperasi tersebut. Selain penyertaan modal, terdapat investasi jangka panjang non permanen lainnya berupa dana bergulir dalam bentuk hewan ternak yang belum disajikan dalam laporan keuangan, (3) Aset Tetap. Dari nilai aset tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 terdapat Aset tetap hasil pengadaan s.d. Tahun 2007 yang belum dicatat dengan konsep harga perolehan, (4) Aset Lainnya. Dari nilai aset lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 terdapat aset lain – lain yang tidak dapat ditelusuri dan dirinci per jenis. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai persediaan tersebut.

Penelitian mengenai nilai informasi laporan keuangan pernah dilakukan oleh Yuliarta (2013), yang meneliti tentang pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua faktor di atas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masala yang diteliti adalah : 1) Apakah kompetensi

pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar? 2) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar? 3) Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar. 2) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar. 3) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar.

TELAAH PUSTAKA

Nilai Informasi

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang

terdapat di dalam Laporan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) : 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 3) Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 4) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kompetensi

Kompetensi pada dasarnya sangat luas pengertiannya, UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan (Sumber :www.bnsp.go.id).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan kompetensi yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah. (Suryadi, 2010:21).

Komponen utama kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang paling terkait mempengaruhi sebagian besar jabatan (peranan atau tanggung jawab), berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan dapat diukur dengan standar-standar yang dapat diterima, serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan (Prihadi: 2004).

Pengendalian Intern

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Definisi

pengendalian internal yang dikemukakan oleh banyak penulis pada umumnya bersumber dari definisi yang dibuat oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) sebagai suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985.

Pada edisi yang baru ini, COSO (2013:3) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut: *“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”*

Memperhatikan pengertian pengendalian internal menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak.

Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010, pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan pengertian yang ada bahwa kompetensi sangat dibutuhkan bagi seorang tenaga kerja terutama pada pejabat penatausahaan keuangan pemerintah. Apabila pejabat penatausahaan akuntansi tidak memiliki kompetensi yang baik serta tidak memiliki pengetahuan

yang memadai mengenai akuntansi, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai. Kemudian pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, juga akan berdampak pada keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan.

Penelitian mengenai nilai informasi laporan keuangan pernah dilakukan oleh Yuliarta (2013), yang meneliti tentang pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua faktor di atas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah sebagai pelaksana wewenang harus memprioritaskan untuk meningkatkan pengendalian intern dengan cara melakukan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) agar peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau kecurangan-kecurangan lainnya semakin sempit. Karena sesuai masalah yang diungkapkan oleh BPK bahwa kerugian Negara pada tahun 2013 paling banyak disebabkan kasus kelemahan pada sistem pengendalian intern. Ketika sistem pengendalian intern lemah dan tidak berfungsi lagi, keuangan pemerintah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran serta terjadi tindakan penyelewengan yang dapat merugikan Negara.

Sehingga dalam hal ini, diperlukan pengendalian intern karena akan berpengaruh terhadap pengelolaan laporan keuangan. Apabila semakin baik sistem intern maka akan semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan yang dihasilkan serta nilai informasi laporan keuangan dapat dipercaya dan meningkatkan keyakinan para

pemakai dalam pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2013) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010, pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan.

Apabila pengawasan suatu pemerintah tidak berfungsi dengan baik maka akan ditakutkan adanya peluang penyelewengan keuangan serta kecurangan-kecurangan lainnya.

Karena salah satu fungsi pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang terjadi serta membandingkan dengan apa

yang seharusnya terjadi, bila ternyata adanya ditemukan hambatan atau penyimpangan, maka penyimpangan atau hambatan tersebut dapat segera diatasi dan dapat segera diambil tindakan koreksi.

Dari penjelasan tersebut dapat diindikasikan bahwa pengawasan keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan karena jika pengawasan dilakukan secara terus-menerus, maka pengelolaan keuangan akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian mengenai nilai informasi laporan keuangan pernah dilakukan oleh Yuliarta (2013), yang meneliti tentang pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua faktor di atas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Kompetensi Pejabat Penatausahaan berpengaruh terhadap Nilai Informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H2 : Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H3 : Pengawasan Keuangan Pemerintah berpengaruh terhadap

nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Yang menjadi onjek pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. SKPD di Kabupaten Kampar berjumlah 34 yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar, 1 Inspektorat Kabupaten Kampar, 1 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar, 18 Dinas, 9 Badan, dan 3 Kantor.

Sampel dalam penelitaian ini adalah pejabat Eselon III, dan IV pada setiap SKPD Kabupaten Kampar. Pada masing-masing SKPD akan disebar 3 buah kuisisioner yang difokuskan pada (1). Kepala masing-masing SKPD, (2) Kepala bagian/staf pencatatan keuangan/akuntansi dan staf pemegang kas SKPD, dan (3) Kepala/staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga responden berjumlah 102 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuisisioner. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 199). Kuisisioner bertujuan untuk mengetahui pendapat responden tentang suatu hal (Ghozali, 2011:47).

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden secara *personally administred*. *Personally administred questionnaires* adalah peneliti melakukan pengambilan dengan cara turun lapangan dan membagikan kuesioner tertulis langsung kepada responden yang menjadi sampel.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif, pengujian kualitas data, dan pengujian asumsi klasik.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2010:206) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Pengujian Kualitas Data

Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau r_{hitung} dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} . Nilai r_{tabel} diperoleh dengan persamaan $N-2 = 83-2 = 81 = 0,197$. Tingkat signifikansi 5%, maka didapat $r_{tabel} 0,197$. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013:53).

Uji Realibilitas Data

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alphas* dengan bantuan program SPSS 17.00. Nilai alpha bervariasi dari 0–1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2013:48). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Untuk mengolah data digunakan Uji Normalitas, yang menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004:34).

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Menurut Ghozali (2013:91), VIF merupakan kebalikan dari *tolerance* jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = \frac{1}{tolerance}$). Cara umum yang dipakai untuk

menunjukkan multikolonieritas adalah jika nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan *VIF* > 10 maka terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Di dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SPRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah *studentized*. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi Uji Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:105).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 102 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 83 (81,37%).

Untuk lebih jelasnya, rincian tingkat pengembalian kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Total	Persentase
Kuesioner yang disebar	102	100%
Kuesioner yang tidak kembali	19	18,63%
Kuesioner yang kembali	83	81,37%
Kuesioner yang dapat diolah	83	100%

Sumber: Data olahan, 2015

Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Hasil Stastistik Deskriptif

	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan	83	27.00	50.00	40.0723	4.88098
Pengendalian Intern Pemerintah	83	36.00	50.00	43.5301	4.32896
Pengawasan Keuangan Daerah	83	17.00	46.00	35.1807	5.53535
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	83	38.00	48.00	41.4940	2.13206

Sumber: Data olahan, 2015

Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau r_{hitung} dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} . Nilai r_{tabel} diperoleh dengan persamaan $N-2 = 83-2 = 81 = 0,197$. Tingkat signifikansi 5%, maka didapat $r_{tabel} 0,197$. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013:53). Berikut ini adalah beberapa tabel hasil uji validitas data masing-masing variable.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	NIPK 1	0,400	0,197	Valid
	NIPK 2	0,313	0,197	Valid
	NIPK 3	0,421	0,197	Valid
	NIPK 4	0,516	0,197	Valid
	NIPK 5	0,434	0,197	Valid
	NIPK 6	0,370	0,197	Valid
	NIPK 7	0,381	0,197	Valid
	NIPK 8	0,339	0,197	Valid
	NIPK 9	0,705	0,197	Valid
	NIPK 10	0,705	0,197	Valid

Sumber: Data olahan, 2015

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan (X1)	KS1	,888	,197	Valid
	KS2	,628	,197	Valid
	KS3	,914	,197	Valid
	KS4	,693	,197	Valid
	KS5	,474	,197	Valid
	KS6	0,583	0,197	Valid
	KS7	0,497	0,197	Valid
	KS8	0,914	,197	Valid
	KS9	0,689	0,197	Valid
	KS10	0,914	0,197	Valid

Sumber: Data olahan, 2015

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern Pemerintah

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	PIP1	0,451	0,197	Valid
	PIP2	0,614	0,197	Valid
	PIP3	0,677	0,197	Valid
	PIP4	0,664	0,197	Valid
	PIP5	0,676	0,197	Valid
	PIP6	0,748	0,197	Valid
	PIP7	0,738	0,197	Valid
	PIP8	0,690	0,197	Valid
	PIP9	0,892	0,197	Valid
	PIP10	0,892	0,197	Valid

Sumber: Data olahan, 2015

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

Variabel	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pengawasan Keuangan Daerah (X3)	PKD1	0,788	0,197	Valid
	PKD2	0,804	0,197	Valid
	PKD3	0,668	0,197	Valid
	PKD4	0,712	0,197	Valid
	PKD5	0,724	0,197	Valid
	PKD6	0,800	0,197	Valid
	PKD7	0,718	0,197	Valid
	PKD8	0,642	0,197	Valid
	PKD9	0,772	0,197	Valid
	PKD10	0,933	0,197	Valid

Sumber: Data olahan, 2015

2. Hasil Uji Realibilitas Data

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS 17.00. Nilai alpha bervariasi dari 0–1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2013:48). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik. Nilai reliabilitas dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan	0,909	0,6	Reliabel
Pengendalian Intern Pemerintah	0,919	0,6	Reliabel
Pengawasan Keuangan Daerah	0,937	0,6	Reliabel
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,808	0,6	Reliabel

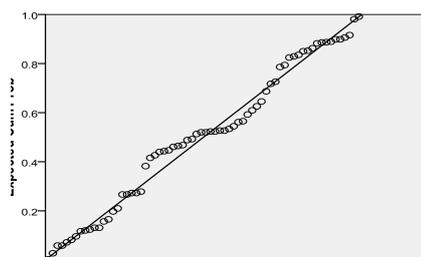
Sumber: Data olahan, 2015

Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas Data

Untuk mengolah data digunakan Uji Normalitas, yang menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004:34). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik 1 di bawah ini.

Gambar 1
Grafik Normal P- P Plot



Sumber: Data olahan, 2015

Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Menurut Ghozali (2013:91), VIF merupakan kebalikan dari *tolerance* jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = \frac{1}{tolerance}$). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$ maka terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 8
Tabel Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan	.955	.048	Tidak terdapat multikolonieritas
Pengendalian Intern Pemerintah	.819	.222	Tidak terdapat multikolonieritas
Pengawasan Keuangan Daerah	.826	.211	Tidak terdapat multikolonieritas

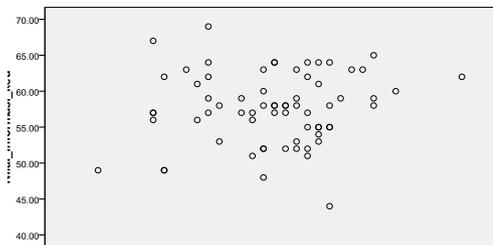
Sumber: Data olahan, 2015

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SPRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Jika tidak ada pola yang

jasas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Uji Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013:105). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2
Grafik ScatterPlot



Sumber: Data diolah, 2015

Hasil Uji Autokorelasi

Di dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	D - W	Keterangan
1	.853	.728	.718	1.13319	1.491	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data olahan, 2015

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Data statistik olahan data SPSS versi 18.00 untuk pengujian secara parsial (uji t) diperlihatkan pada

Penjelasan berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 19,907 + 0,026 X_1 + 0,032 X_2 + 0,021 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y= Variabel Terikat (Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah)

X₁=Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan

X₂=Pengendalian Intern Pemerintah

X₃= Pengawasan Keuangan Daerah

α= Konstanta

e= Galat (error)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*R²*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (*R²*) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	D-W	Ket
1	.835 ^a	.728	.718	1.13319	1.491	Korelasi sangat kuat

Sumber: Data olahan, 2015

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini telah disimpulkan sebuah hipotesis yaitu :

H1: Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap Nilai

Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui t hitung $(8,120) > t$ tabel $(1,99)$ dan $\text{Sig.}(0,000) < 0,05$. Artinya variabel Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartono (2006) dan Sartika (2008) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini telah disimpulkan sebuah hipotesis yaitu : H2: Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui t hitung $(5,345) > t$ tabel $(1,99)$ dan $\text{Sig.}(0,000) < 0,05$. Artinya variabel Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartono (2006) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini telah disimpulkan sebuah hipotesis yaitu :

H3: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui t hitung $(7,573) > t$ tabel $(1,99)$ dan $\text{Sig.}(0,000) < 0,05$. Artinya variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2009) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fery Istanto (2010) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh signifikan sebesar $.026$ terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan sebesar $.032$ terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adanya hubungan antara pengendalian intern pemerintah dengan nilai informasi pelaporan

keuangan pemerintah daerah dapat dipahami.

3. Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan sebesar .021 terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini untuk selanjutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya pada satu kabupaten, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen, yaitu kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2011. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I. <http://www.bpk.go.id/web/?p=9982> akses 14 maret 2015.

Ghozah, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*,

Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indrawati, Dwi Anita. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal.

Prihadi, S, 2004, *Kinerja, Aspek Pengukuran*, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarsip. 2001. *Coorporat Governance Audit: Paradigma Baru Profesi Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*. Media Akuntansi, NO. 17/TH. VII.PP. II-VII

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE

Tricker. (1984). *Corporate Governance-Paractices, Procedures and Power in British Companies and Their Board Of Dorectors*. Economist Books. ISBN 1-84668-1 67-7.Uk, Gower.

Yuliarta. 2013. *Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan*

*Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang).*Jurnal Penelitian Universitas Negeri Padang.

Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah..

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.